

ABSTRACT

Reviving the abandoned land (ihyā' al-mawāt) is very necessary for the people to do it for the advancement of to form harmonious family relationships, sufficient in terms of livelihood and so on. However, from the other side, is the right to use abandoned land the same as property rights in general where the owners of these rights can use it freely, either by selling, inheriting, and so on. The purpose of this study is to explain the influence of the transfer of land ownership in ihya' al-mawat on the inheritance rights from the perspective of fiqh shafi'iyah and UUPA, and to describe the similarities and differences between fiqh shafi'iyah and UUPA regarding the transfer of land ownership in ihya' al-mawat and its influence on inheritance rights. This research is a (library research). The results of this study are; (1) The status of the land resulting from ihya' al-mawat according to fiqh shafi'iyah can result in absolute ownership, while according to the election law it is not absolute Rather, it is given the right and authority by the state in accordance with the promised provisions and period. And both agreed that the land could be transferred to the heirs with different provisions, (2) There are differences and similarities in the concept of ihya' al-mawat, among the differences are that according to fiqh syafi'iyah the method of clearing dead land does not require permission from the government/ruler, while according to the law it is required to register land and permits from related agencies. (3) Both agreed that the status of the land produced by Ihya' al-Mawat can be transferred to the heirs, but the authority of the rights for the heirs over the land is different, the authority of the Land rights for heirs according to fiqh Syafi'iyah are absolute authority, while according to the UUPA it is not absolute but given authority by the state in accordance with the promised provisions and period.

Keywords: Ihya' al-Mawat, Basic Agrarian Law, Inheritance Rights.

ABSTRAK

Menghidupkan tanah terlantar (*ihyā' al-mawāt*) kiranya sangat perlu dilakukan oleh masyarakat guna untuk membentuk hubungan keluarga yang harmonis, berkecukupan dari segi mata pencarian dan lain sebagainya. Namun dari sisi lain, hak pemanfaatan tanah terlantar tersebut apakah sama seperti hak milik pada umumnya dimana para pemilik hak tersebut dapat menggunakannya secara bebas, baik dengan menjual, mewarisi, dan lain sebagainya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan status kewarisan tanah hasil dari *ihyā' al-mawāt* perspektif *Fiqh Syāfi'iyah* dan UUPA, dan untuk mendeskripsikan sisi persamaan dan perbedaan *fiqh syāfi'iyah* dan UUPA tentang pengalihan kepemilikan tanah dalam *ihyā' al-mawāt* serta pengaruhnya terhadap hak waris. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Adapun hasil dari penelitian ini adalah; (1) status tanah hasil dari *ihyā' al-mawāt* menurut *Fiqh Syāfi'iyah* bisa mengakibatkan kepemilikan secara mutlak, sedangkan menurut Undang-undang kepemilikan tidak secara mutlak melainkan diberi hak wewenang oleh negara sesuai dengan ketentuan dan jangka waktu yang dijanjikan. Serta keduanya sepakat bahwa tanah tersebut bisa beralih kepada ahli waris dengan ketentuan berbeda, (2) terdapat perbedaan dan persamaan dalam konsep *ihyā' al-mawāt*, diantara perbedaannya adalah menurut *Fiqh Syāfi'iyah* cara membuka lahan mati tidak diharuskan izin dari pemerintah/pengusa, sedangkan menurut Undang-undang diharuskan pendaftaran tanah dan izin dari instansi terkait. (3) keduanya sepakat bahwa status tanah hasil *ihyā' al-mawāt* tersebut bisa beralih hak kepada ahli waris, namun wewenang hak bagi ahli waris atas tanah tersebut berbeda, wewenang hak tanah bagi ahli waris menurut *fiqh syāfi'iyah* adalah wewenang secara mutlak, sedangkan menurut UUPA bukan secara mutlak tetapi diberi hak wewenang oleh negara sesuai dengan ketentuan dan jangka waktu yang dijanjikan.

Kata kunci: Hak Waris, *ihyā' al-mawāt*, *Fiqh Syāfi'iyah*, dan Undang-undang Pokok Agrari